



Upayakan Raih Predikat WTP

SUNGAIRAYA - Berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum lama ini, Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengatakan tahun 2014 ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait pengelolaan keuangan daerah serta program-program pembangunan.

"Berdasarkan hasil audit BPK saat ini Kubu Raya masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, tinggal satu tahapan lagi kita mencapai wajar tanpa pengecualian," kata Hermanus. Target memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dinilai Hermanus merupakan salah satu keinginan setiap kabupaten/kota di Kalbar. "Untuk meraih predikat wajar tanpa pengecualian itu, saat ini kami mengimbau semua pihak terkait untuk bisa bekerja lebih keras dan lebih optimal lagi," terangnya. Saat disinggung mengenai apa saja yang menjadi penilaian BPK, Hermanus menerangkan, dalam hal ini BPK menilai banyak hal dan temuan-temuan terkait persoalan keuangan daerah.

"Salah satu hal yang terpenting lagi dan menjadi sorotan BPK yakni persoalan aset. Kita pemerintah daerah diminta sesegera mungkin memperbaiki persoalan aset itu," katanya.

Dia pun berharap, dengan adanya hasil audit tersebut, pihaknya dapat melakukan berbagai pembenahan secara global. Sehingga pada penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak lagi mendapatkan penilaian opini wajar dengan pengecualian. Setelah mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan pada tanggal 2 Juni lalu, kata Hermanus, pemerintah Kubu Raya langsung melaksanakan rapat gabungan pada 6 Juni untuk menindaklanjuti hasil audit BPK.

"Laporan hasil pemeriksaan ini penting diketahui semua SKPD di Kubu Raya sehingga mulai sekarang bisa berbenah dan nantinya laporan keuangan daerah kita jauh lebih baik lagi," ucap Hermanus seraya mengimbau kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya termasuk masyarakat Kubu Raya melaporkan kepada pihaknya termasuk BPK, jika kedepan di lapangan ditemukan adanya indikasi penyelewengan penggunaan keuangan negara ataupun program-program pemerintah kabupaten yang tidak tepat pada sasaran. (ash)